

ANALISIS PEMAHAMAN KEWARGANEGARAAN EKOLOGIS MASYARAKAT PINGGIRAN SUNGAI DELI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Egrin Manurung¹, Ramsul Nababan²

^{1,2} Universitas Negeri Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia
e-mail: ¹ginmnr261002@gmail.com, ²ramsulyandinbbn@unimed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat pinggiran Sungai Deli memandang kewarganegaraan ekologis berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih sampel. Informan penelitian adalah masyarakat pinggiran Sungai Deli berjumlah 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat kewarganegaraan ekologis masih rendah di kalangan masyarakat pinggiran Sungai Deli. Kewarganegaraan ekologis belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan oleh masyarakat setempat, Mayoritas masyarakat beranggapan bahwa tindakan membuang sampah pada tempatnya sudah cukup sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesenjangan antara masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan yang tidak peduli masih terlihat jelas. Dilihat dari masih banyak masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di sekitar Sungai Deli. Hambatan dan kendala partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pinggiran Sungai Deli mencakup berbagai faktor, termasuk keterbatasan fasilitas, keterbatasan waktu, serta kurangnya informasi dan edukasi mengenai lingkungan hidup.

Kata Kunci: Kewarganegaraan Ekologis, Lingkungan Hidup, Sungai Deli

Abstract

This study aims to understand how the community living along the Deli River views ecological citizenship based on the Environmental Protection and Management Act. The method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data were collected through primary and secondary sources. Primary data were obtained from interviews, documentation, and observations, while secondary data came from books, journals, and articles relevant to the research topic. The study used purposive sampling to select the sample, which consisted of 10 people from the Deli River community. The results show that the level of ecological citizenship is still low among the Deli River community. Ecological citizenship is not fully understood and practiced by the local community. The majority of people believe that disposing of waste in its proper place is sufficient participation in environmental management. There is a clear gap between those who care about the environment and those who do not, as many community members are not involved in environmental management activities around the Deli River. The barriers and obstacles to community participation in environmental protection and management in the Deli River area include various factors such as limited facilities, time constraints, and a lack of information and education about the environment.

Keywords: Ecological Citizenship, Environment, Deli River

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan awalnya merupakan bagian dari proses alami, tetapi kini telah menjadi kompleks karena kontribusi manusia seperti mobilitas, perkembangan budaya, dan perubahan zaman yang memengaruhi karakter dan pandangan manusia. Ketidakseimbangan dalam pengelolaan lingkungan adalah faktor utama bencana alam di Indonesia. Akar dari masalah ini adalah pembangunan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan lingkungan, yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran. Pencemaran terjadi ketika zat atau energi

diperkenalkan oleh aktivitas manusia atau proses alam hingga mencapai konsentrasi yang merusak kondisi tersebut, berdampak pada kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.

Di antara berbagai isu lingkungan, pencemaran menjadi perhatian utama karena dampaknya yang besar dan memicu masalah lain. Vietnam, sebagai negara berkembang di Asia Tenggara, menghadapi pencemaran akibat perkembangan ekonomi besar-besaran. Pencemaran di Vietnam mencakup udara, sungai, hutan, dan air bersih, seperti pencemaran Sungai Thi Vai oleh perusahaan Vedan dengan limbah MSG tinggi organik. Di Indonesia, pencemaran sungai juga terjadi akibat aktivitas manusia yang merusak kualitas air. Contohnya, pencemaran Sungai Beringin di Perumahan Griya Bringin, Wonosari, akibat limbah laundry. Penelitian oleh Ansori dan rekan menunjukkan tingginya kandungan MBAS (30,081 mg/L), COD (416,67 mg/L), dan BOD (129,17 mg/L) di sungai tersebut, melebihi baku mutu (MBAS 5 mg/L, COD 100 mg/L, BOD 6 mg/L), mengindikasikan pencemaran ringan dengan indeks lebih dari satu (Ikbal et al., 2023). Di Sumatera Utara, khususnya Medan, Sungai Deli tercemar akibat aktivitas industri dan domestik. Laporan Badan Lingkungan Hidup Sumut 2019 mencatat 54 industri dan 27 saluran limbah domestik sepanjang Sungai Deli. Industri-industri seperti cat, elektroplating, baja, dan makanan menggunakan bahan yang mencemari sungai seperti garam kromium (Cr). Tim Ekspedisi Sungai Nusantara menemukan kontaminasi mikroplastik di Sungai Deli dengan rata-rata 233 partikel per 100 liter pada 2022. Faktor penyebabnya termasuk 388 pohon terlilit sampah plastik dan 232 timbunan sampah ilegal di tepi sungai. Penelitian mahasiswa USU 2020 menemukan tingkat kontaminasi mikroplastik 8 hingga 152 partikel per liter, atau 800 hingga 15.200 partikel per 100 liter, menunjukkan dampak besar dari limbah domestik, industri, dan sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik (Efendi, 2022).

Kasus pencemaran sungai ini menunjukkan kerusakan lingkungan akibat tindakan manusia, seperti pembuangan sampah sembarangan dan limbah industri. Tindakan ini menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan fisik yang tidak selaras dengan pelestarian lingkungan, serta menimbulkan masalah lingkungan lainnya. Ini menunjukkan bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga, mengelola, dan melestarikan lingkungan sekitarnya, yang disebut kewarganegaraan ekologis. Kewarganegaraan ekologis berarti kesadaran warga negara untuk bertanggung jawab dalam merawat, mengelola, dan melestarikan lingkungan, dengan pemahaman hak dan kewajiban mereka.

Kewarganegaraan ekologis adalah gagasan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari kewarganegaraan mereka. Ini melibatkan kesadaran dampak individu terhadap ekosistem, serta komitmen berkontribusi pada pelestarian dan pengelolaan lingkungan. Kewarganegaraan ekologis mencakup partisipasi dalam kebijakan

lingkungan, praktik berkelanjutan, dan edukasi untuk mendukung keberlanjutan hidup di Indonesia. Penerapan konsep ini bergantung pada pemahaman warga negara terhadap konsep tersebut. Pemahaman ini penting, terutama bagi masyarakat pinggiran Sungai Deli, untuk menciptakan kesadaran dalam menjaga lingkungan sekitar sungai. Dukungan terhadap program kerja pemerintah menjadi langkah konkret, dan pemahaman solid tentang kewarganegaraan ekologis menjadi sumber utama partisipasi masyarakat pinggiran Sungai Deli dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan di sekitar sungai. Kesadaran yang muncul dari pemahaman ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sepanjang Sungai Deli.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap individu memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat, yang harus diimbangi dengan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti partisipasi masyarakat, transparansi, dan kesetaraan menjadi dasar untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan hak, kewajiban, dan peran mereka. Prinsip partisipatif ini juga diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa upaya sistematis dan terpadu harus dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan kerusakan. Pengelolaan lingkungan mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pencegahan, penanggulangan kerusakan, dan pemulihan kualitas lingkungan memerlukan kebijakan, program, dan kegiatan yang didukung oleh kelembagaan yang stabil, sumber daya manusia, kemitraan lingkungan, perangkat hukum, informasi, dan pendanaan.

Keterkaitan dan keseluruhan esensi lingkungan menuntut integrasi pengelolaan lingkungan dengan seluruh pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menyokong pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mencakup pendekatan lingkungan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia, sekaligus menyesuaikan aktivitas manusia dengan kapasitas sumber daya alam. Konsep ini sejalan dengan UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai usaha sadar dan terencana untuk menyatukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan, guna menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi kini dan

masa depan. Melihat kompleksitas isu lingkungan dan pentingnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat, penulis tertarik melakukan penelitian berfokus pada, “Analisis Pemahaman Kewarganegaraan Ekologis Masyarakat Pinggiran Sungai Deli dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, metode kualitatif meneliti kondisi objek yang alami dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Yin, studi kasus adalah metode empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks dunia nyata, terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak jelas (Nurahma & Hendriani, 2021). Lokasi penelitian ini adalah di pinggiran Sungai Deli, Kelurahan AUR, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, karena belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pemilihan sampel berdasarkan persyaratan khusus yang dibutuhkan. Sampel dipilih secara sengaja berdasarkan karakteristik atau kriteria yang relevan dengan penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan penelitian ini adalah 10 warga pinggiran Sungai Deli di Kelurahan AUR, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Kewarganegaraan Ekologis Masyarakat Pinggiran Sungai Deli Berdasarkan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kewarganegaraan ekologis merujuk pada kesadaran dan partisipasi aktif warga dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di Indonesia, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum yang mengatur tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat dengan UUPPLH, menetapkan kerangka hukum bagi pengelolaan lingkungan di Indonesia. UUPPLH ini mengamanatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan, termasuk melalui edukasi, pengawasan, dan keterlibatan aktif dalam program-program lingkungan. Meskipun demikian, implementasi dan pemahaman tentang kewarganegaraan ekologis di lapangan, khususnya di kalangan masyarakat pinggiran Sungai Deli, masih terbilang rendah.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat pinggiran Sungai Deli, pemahaman mereka tentang kewarganegaraan ekologis dapat dianalisis melalui beberapa indikator pemahaman

menurut Benyamin S. Bloom. Menurut Benyamin S. Bloom dalam (Quarizmi, 2022) pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah informasi tersebut diketahui dan diingat. Seseorang dianggap memahami sesuatu jika ia dapat memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal tersebut dengan menggunakan bahasanya sendiri.

1. *Interpreting* (Interpretasi)

Interpretasi adalah kemampuan untuk menerima informasi dan menjelaskannya dalam bentuk lain. Dari wawancara, beberapa warga seperti Bapak Icap, Bapak Ahmad, dan Ibu Kasmawati mampu menginterpretasikan konsep kewarganegaraan ekologis dengan baik. Mereka menjelaskan bahwa kewarganegaraan ekologis melibatkan kesadaran dan tanggung jawab individu serta kolektif untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Mereka menyadari pentingnya tindakan aktif seperti mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang, menghemat energi, dan mendukung kebijakan ramah lingkungan. Namun, beberapa warga lain, seperti Ibu Tuti, Ibu Safrida, Ibu Roswati, Ibu Mirna, Ibu Nur, dan Ibu Wati, tidak mengetahui apa itu kewarganegaraan ekologis, menunjukkan kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang konsep ini di kalangan mereka.

2. *Exemplifying* (Mencontohkan)

Exemplifying adalah kemampuan untuk mengilustrasikan suatu konsep yang telah dipelajari. Contoh yang diberikan oleh warga seperti Bapak Icap dan Bapak Ahmad menunjukkan tindakan nyata yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk melestarikan lingkungan. Bapak Icap menyebutkan mengurangi penggunaan sumber daya alam tak terbarukan dan melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Bapak Ahmad mencontohkan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mengelola sampah rumah tangga. Ibu Kasmawati dan Bapak Adnan menunjukkan partisipasi aktif mereka dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan dan penanaman pohon. Beberapa ibu lainnya juga menunjukkan tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, meskipun pemahaman mereka tentang dampaknya masih terbatas.

3. *Classifying* (Mengklasifikasikan)

Classifying adalah kemampuan untuk mengelompokkan hal berdasarkan ciri-ciri tertentu. Bapak Icap dan Bapak Ahmad menyadari pentingnya pengelolaan limbah untuk mencegah pencemaran Sungai Deli. Mereka memahami bahwa pencemaran air dapat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan keanekaragaman hayati. Ibu Kasmawati juga mengakui bahwa masyarakat di pinggiran sungai sangat bergantung pada kebersihan dan kesehatan sungai untuk kehidupan sehari-hari. Namun, beberapa ibu lainnya seperti Ibu Tuti dan Ibu Roswati memiliki

pemahaman yang kurang mendalam tentang pentingnya kewarganegaraan ekologis, meskipun mereka menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah banjir.

4. *Summarizing* (Meringkas)

Summarizing adalah kemampuan untuk merangkum keseluruhan isi informasi atau tema dalam bentuk ringkasan. Dari wawancara, Bapak Icap, Bapak Ahmad, dan Bapak Adnan menunjukkan pemahaman yang baik dan tingkat kewarganegaraan ekologis yang tinggi (skala 4). Mereka menunjukkan kesadaran akan lingkungan, partisipasi dalam kegiatan lingkungan, dan penerapan praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Kasmawati berada di skala 3, menunjukkan pemahaman yang baik namun terbatas oleh prioritas ekonomi. Ibu Tuti dan Ibu Nur berada di skala 2, menunjukkan pemahaman yang rendah dan dipengaruhi oleh lingkungan fisik yang buruk dan kurangnya motivasi. Ibu Roswati, Ibu Mirna, Ibu Safrida, dan Ibu Wati berada di skala 1, menunjukkan pemahaman yang sangat rendah dan dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dan prioritas ekonomi yang mendesak.

5. *Inferring* (Menyimpulkan)

Inferring adalah kemampuan untuk menemukan pola dan membuat kesimpulan. Beberapa warga seperti Bapak Icap, Bapak Ahmad, dan Bapak Adnan menyimpulkan bahwa waktu yang terbatas, kehidupan yang sibuk, dan prioritas lain dalam kehidupan menjadi penghalang utama dalam upaya pelestarian lingkungan. Ibu Kasmawati juga menyimpulkan bahwa kurangnya informasi dan keterbatasan waktu menjadi faktor penghambat. Warga lainnya mungkin tidak secara eksplisit menyimpulkan faktor penghambat, tetapi kurangnya informasi dan sosialisasi serta prioritas ekonomi yang mendesak jelas mempengaruhi pemahaman dan tindakan mereka terhadap lingkungan.

6. *Comparing*

Comparing dalam pemahaman Bloom mengacu pada kemampuan seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi. Ini termasuk membandingkan bagaimana kejadian itu terjadi dan mencari hubungan antara elemen-elemen dalam objek atau situasi yang berbeda. Temuan dari wawancara bahwa Masyarakat yang lebih mampu secara ekonomi cenderung lebih peduli terhadap lingkungan karena memiliki sumber daya untuk mendukung praktik ramah lingkungan. Masyarakat dengan keterbatasan ekonomi lebih fokus pada kebutuhan dasar sehari-hari daripada pelestarian lingkungan. Selanjutnya ada kesenjangan sikap di masyarakat, terutama karena beberapa anggota mungkin kurang menyadari pentingnya menjaga lingkungan atau memiliki prioritas lain yang lebih mendesak. Terdapat perbedaan kepedulian terhadap lingkungan; beberapa orang sangat peduli sementara yang lain tidak,

dengan faktor lingkungan fisik yang buruk mengurangi motivasi untuk peduli. Faktor psikologis seperti tingkat kesadaran individu mempengaruhi kepedulian terhadap lingkungan. Ada perbedaan dalam kepedulian dan aktivitas menjaga lingkungan, dengan kebutuhan ekonomi sering menjadi prioritas lebih tinggi daripada pelestarian lingkungan.

7. *Explaining* (Menjelaskan)

Dimensi *Explaining* dalam pemahaman Bloom mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengembangkan dan menggunakan penyebab atau pengaruh dari suatu objek. Ini termasuk menjelaskan mengapa suatu hal penting atau bagaimana suatu hal dapat mempengaruhi hal lain. Temuan dari wawancara bahwa masyarakat merasa peduli dan aktif dalam kegiatan lingkungan seperti gotong royong dan membuang sampah pada tempatnya karena pentingnya menjaga lingkungan sendiri karena pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan untuk kualitas hidup masyarakat. Terlibat aktif dalam berbagai kegiatan lingkungan seperti pembersihan sungai dan penanaman pohon. Namun ada juga Masyarakat yang peduli terhadap lingkungan tetapi mungkin tidak seaktif orang lain yang lebih tahu tentang masalah lingkungan.

Secara keseluruhan, pemahaman masyarakat pinggiran Sungai Deli tentang kewarganegaraan ekologis bervariasi. Beberapa warga memiliki pemahaman yang baik dan mengambil tindakan aktif untuk melestarikan lingkungan, sementara yang lain memiliki pemahaman yang terbatas atau tidak tahu sama sekali tentang konsep ini. Ada perbedaan yang signifikan antara individu dalam hal kesadaran dan tindakan terhadap lingkungan, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan psikologis. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi, prioritas ekonomi, dan akses terbatas terhadap informasi mempengaruhi tingkat pemahaman dan tindakan mereka terhadap lingkungan. Upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih baik dari pemerintah dan organisasi lingkungan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

Pemahaman kewarganegaraan ekologis yang masih minim di kalangan masyarakat pinggiran Sungai Deli terlihat dari persepsi mereka tentang kontribusi terhadap lingkungan. Banyak warga yang beranggapan bahwa membuang sampah pada tempatnya sudah cukup sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Padahal, kewarganegaraan ekologis mencakup lebih dari sekadar tindakan preventif sederhana. Masyarakat pinggiran Sungai Deli menghadapi berbagai tantangan dalam memahami dan menerapkan kewarganegaraan ekologis. Banyak warga yang menganggap bahwa tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya sudah cukup sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Namun, pemahaman ini sangat terbatas dan tidak mencakup partisipasi aktif dalam upaya yang lebih luas seperti pelestarian, pemulihan, dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Terdapat kesenjangan yang jelas antara masyarakat yang peduli dan tidak peduli terhadap lingkungan Sungai Deli. Sebagian masyarakat mungkin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian sungai, namun keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan pengelolaan lingkungan masih terbatas. Banyak warga yang tidak terlibat dalam upaya tersebut, baik karena ketidaktahuan mengenai kegiatan yang ada, keterbatasan waktu, maupun karena kurangnya kesadaran lingkungan akan pentingnya partisipasi mereka.

Kesadaran lingkungan tidak hanya melibatkan pengetahuan tetapi juga penerapannya. Masyarakat harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan lingkungan hidup dan berani mengambil tindakan untuk melindungi bumi. Pengetahuan saja tidak cukup; masyarakat harus menerjemahkan pengetahuan ini ke dalam tindakan nyata. Kesadaran lingkungan tidak hanya sekedar memiliki informasi, tetapi juga tentang kepedulian dan komitmen. Didorong oleh pemahaman terhadap isu-isu lingkungan dan menunjukkan keberanian untuk mengambil tindakan, bahkan ketika masa-masa sulit. Kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan merupakan hambatan utama dalam mencapai kesadaran lingkungan yang sesungguhnya. Masyarakat harus berupaya menjembatani kesenjangan ini dan menerjemahkan pengetahuan menjadi kebiasaan dan pilihan ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Mayoritas masyarakat menekankan pentingnya tidak hanya memiliki pengetahuan tentang isu lingkungan, tetapi juga mengubah pengetahuan tersebut menjadi tindakan nyata, seperti berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, pembersihan sungai, dan kampanye kesadaran lingkungan. Namun, sebagian responden mengakui kurangnya keterlibatan aktif atau kekurangan informasi, menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan implementasi tindakan konkret dalam menjaga lingkungan.

Secara konsisten, masyarakat menyoroti bahwa aktivitas masyarakat seperti pembuangan sampah sembarangan dan penggunaan bahan kimia berdampak negatif yang signifikan terhadap kualitas air sungai dan ekosistem sekitarnya. Pencemaran air oleh limbah domestik dan industri, serta keberadaan mikroplastik, telah menyebabkan penurunan populasi beberapa spesies dan kerusakan ekosistem di Sungai Deli. Kendala yang diidentifikasi meliputi:

1. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi: Banyak responden mengeluhkan bahwa kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan menjadi hambatan

utama. Hal ini mencakup pemahaman yang kurang dalam masyarakat tentang tindakan yang tepat untuk memelihara kebersihan sungai dan lingkungan secara umum.

2. Kurangnya Dukungan Pemerintah dan Infrastruktur: Terbatasnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk fasilitas dan infrastruktur juga menjadi tantangan serius. Ini mencakup kekurangan dalam manajemen limbah yang efektif dan upaya yang kurang untuk memulihkan kondisi lingkungan yang tercemar. Dengan memahami tantangan ini secara menyeluruh, dapat dikembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi serta memulihkan lingkungan Sungai Deli, sambil meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Hambatan dan Kendala Dalam Partisipasi Kewarganegaraan Ekologis Masyarakat Sungai Deli

Partisipasi kewarganegaraan ekologis merupakan elemen kunci dalam upaya pelestarian lingkungan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Deli. Namun, meskipun pentingnya keterlibatan masyarakat telah diakui secara luas, berbagai hambatan dan kendala masih menjadi penghalang utama yang menghambat partisipasi aktif warga. Berbagai faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam partisipasi kewarganegaraan ekologis masyarakat pinggiran sungai Deli adalah:

1. Fasilitas Yang Terbatas

Fasilitas yang memadai merupakan komponen krusial dalam keberhasilan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di wilayah pinggiran Sungai Deli, keterbatasan fasilitas menjadi salah satu hambatan utama yang menghalangi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan bagaimana keterbatasan fasilitas ini menjadi penghambat:

a. Kurangnya Infrastruktur Dasar

Sarana dan prasarana dasar seperti tempat pembuangan sampah yang memadai, sarana daur ulang, dan fasilitas kebersihan umum sering kali tidak tersedia atau tidak mencukupi. Tanpa fasilitas ini, masyarakat kesulitan untuk mengelola sampah dengan benar, yang mengakibatkan penumpukan sampah di sekitar area sungai. Selain itu, kurangnya akses terhadap air bersih dan toilet umum yang layak juga dapat menghambat upaya menjaga kebersihan lingkungan.

b. Minimnya Fasilitas Edukasi dan Penyuluhan

Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan, fasilitas edukasi dan penyuluhan sangat diperlukan. Namun, di

pinggiran Sungai Deli, fasilitas semacam ini sering kali tidak tersedia atau jarang diadakan. Tanpa penyuluhan yang memadai, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang cara-cara menjaga lingkungan yang efektif dan manfaat dari tindakan tersebut.

c. **Ketiadaan Peralatan dan Sumber Daya** Peralatan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan pembersihan dan pelestarian lingkungan sering kali terbatas. Misalnya, alat pembersih, kendaraan pengangkut sampah, dan bahan-bahan untuk kegiatan penghijauan seperti bibit tanaman dan pupuk mungkin tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Ketiadaan peralatan ini membuat kegiatan lingkungan hidup menjadi tidak efektif dan sulit dilaksanakan.

d. **Dukungan Finansial yang Tidak Memadai**

Dukungan finansial untuk program-program lingkungan hidup sering kali terbatas. Kurangnya dana mengakibatkan minimnya pembelian peralatan, penyediaan insentif bagi masyarakat yang berpartisipasi, dan pelaksanaan program edukasi lingkungan. Dukungan finansial yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa semua aspek program lingkungan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

e. **Keterbatasan Ruang Publik**

Ruang publik yang digunakan untuk kegiatan lingkungan seperti taman kota, area hijau, dan tempat berkumpul sering kali kurang atau tidak terawat. Keterbatasan ruang ini menghambat pelaksanaan program lingkungan yang membutuhkan tempat khusus untuk berkumpul, berdiskusi, dan bekerja sama dalam kegiatan pelestarian lingkungan.

2. Keterbatasan Waktu Masyarakat

Keterbatasan waktu merupakan salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh masyarakat pinggiran Sungai Deli dalam berpartisipasi dalam program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hambatan ini bersumber dari beberapa faktor yang saling berkaitan, yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Berikut adalah pembahasan mengenai aspek-aspek yang berkontribusi terhadap keterbatasan waktu masyarakat:

a. **Tuntutan Pekerjaan dan Kehidupan Ekonomi**

Sebagian besar masyarakat di pinggiran Sungai Deli memiliki pekerjaan yang menuntut banyak waktu dan tenaga. Banyak yang bekerja di sektor informal dengan jam kerja yang tidak menentu dan panjang. Prioritas utama mereka adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga waktu yang tersedia untuk kegiatan tambahan, seperti program lingkungan hidup, sangat terbatas.

b. Tanggung Jawab Keluarga

Selain pekerjaan, tanggung jawab keluarga juga memakan banyak waktu dan perhatian. Mengurus anak, merawat orang tua, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya sering kali menjadi prioritas utama bagi banyak anggota masyarakat. Tanggung jawab ini membuat mereka sulit meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan hidup.

c. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman tentang Pentingnya Keterlibatan

Meskipun ada kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, sering kali masyarakat belum sepenuhnya memahami dampak jangka panjang dari keterlibatan aktif dalam program lingkungan hidup. Kurangnya pemahaman ini membuat mereka kurang termotivasi untuk meluangkan waktu yang mereka miliki, yang sudah sangat terbatas untuk kegiatan tersebut.

3. Kurangnya Informasi dan Edukasi Lingkungan Hidup

Kurangnya informasi dan edukasi mengenai lingkungan hidup merupakan salah satu hambatan signifikan yang menghalangi upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan di pinggiran Sungai Deli. Hambatan ini mempengaruhi tingkat kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan. Berikut adalah pembahasan mengenai aspek-aspek yang berkontribusi terhadap kurangnya informasi dan edukasi lingkungan hidup:

1. Minimnya Sosialisasi dari Pemerintah dan Lembaga Terkait Sosialisasi dari pemerintah dan lembaga terkait sering kali tidak memadai atau tidak mencapai seluruh lapisan masyarakat. Program-program lingkungan hidup yang ada mungkin kurang dipromosikan atau disebarakan dengan cara yang efektif. Informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup sering kali tidak sampai ke masyarakat pinggiran Sungai Deli.
2. Kurangnya Akses ke Media Informasi, Banyak masyarakat pinggiran Sungai Deli yang tidak memiliki akses yang memadai ke media informasi seperti internet, televisi, atau surat kabar. Hal ini membuat mereka tidak mendapatkan informasi terbaru tentang isu-isu lingkungan, program perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Keterbatasan ini juga mencakup kurangnya distribusi materi edukatif seperti pamflet, poster, dan buku panduan.
3. Kurangnya Program Pelatihan dan Workshop, Program pelatihan dan workshop yang dapat memberikan keterampilan praktis dalam pengelolaan lingkungan hidup sering kali tidak tersedia atau jarang diadakan. Pelatihan semacam ini penting untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan lingkungan.

4. Rendahnya Kesadaran Akan Dampak Jangka Panjang, Banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya menyadari dampak jangka panjang dari perilaku mereka terhadap lingkungan. Kurangnya edukasi menyebabkan rendahnya pemahaman tentang bagaimana tindakan sehari-hari seperti pembuangan sampah sembarangan, penggunaan bahan kimia, dan deforestasi dapat merusak lingkungan dalam jangka panjang

SIMPULAN

Pemahaman kewarganegaraan ekologis masyarakat pinggiran sungai deli berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan oleh masyarakat setempat, mayoritas masyarakat beranggapan bahwa tindakan membuang sampah pada tempatnya sudah cukup sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Banyak masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga daerah sungai namun tidak memiliki kepedulian untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Meskipun masyarakat menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan serta memahami dampak aktivitas mereka terhadap Sungai Deli, kepedulian tersebut belum terwujud dalam tindakan konkret dan partisipasi aktif. Ketidakaktifan masyarakat dalam pelestarian lingkungan disebabkan oleh ketidaktahuan mengenai kegiatan lingkungan, keterbatasan waktu, dan fasilitas yang ada. Kurangnya sosialisasi tentang undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga berkontribusi pada rendahnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban mereka. Sebagai hasilnya, kesadaran akan pelestarian lingkungan di kalangan masyarakat pinggiran Sungai Deli masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan informasi dan fasilitas.

Hambatan dan kendala dalam partisipasi kewarganegaraan ekologis masyarakat Sungai Deli mencakup berbagai faktor, termasuk keterbatasan fasilitas, keterbatasan waktu, serta kurangnya informasi dan edukasi mengenai lingkungan hidup. Faktor-faktor ini merupakan hambatan signifikan yang menghalangi partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Keterbatasan fasilitas menghambat masyarakat dalam mengakses sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan mereka. Selain itu, keterbatasan waktu, yang disebabkan oleh beban pekerjaan dan tanggung jawab sehari-hari, membuat masyarakat sulit untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan lingkungan. Kurangnya informasi dan edukasi mengenai isu-isu lingkungan hidup juga memperparah situasi, karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan untuk memahami pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan cara efektif untuk berkontribusi dalam upaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Efendi, R. (2022, Juni 24). *Liputan 6*. Diambil kembali dari Liputan 6 Web Site : <https://www.liputan6.com/regional/read/4994969/temuan-tim-ekspedisi-sungai-nusantara-sampah-plastik-di-sungai-deli-didominasi-3-brand-besar?page=4>
- Nasution, A. F. (Bandung). *Metode Penelitian Kualitatif*. 2023: CV Harfa Creative
- Nurahma, G. A., & Hendriani, W. (2021). *Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif*. 7(2), 119–129.
- Quarizmi, A. (2022). *Pemahaman Siswa Terhadap Mata Pelajaran Fikih Dalam Materi Hudud Pada Siswa Kelas XI MAN 1 Kota Bengkulu*. 3, 128–135.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup